

**PENAMBAHAN AREAL TANAM PERTANIAN, EROSI DAN PEMINGGIRAN
MASYARAKAT SEKITAR HUTAN: DILEMATIS INTENSIFIKASI
PENGELOLAAN HUTAN**

***AGRICULTURAL PLANTING AREA ADDITION, EROSION AND FOREST
COMMUNITIES MARGINALIZATION: DILEMMA OF FOREST MANAGEMENT
INTENSIFICATION***

Andi Faisal Suddin¹⁾, Roosganda Elizabeth²⁾

¹⁾BPTP Sulawesi Selatan

E-mail: andifaisal@yahoo.co.id

²⁾Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

E-mail: roosimanru@yahoo

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk yang kian meningkat diiringi kebutuhan lahan pertanian yang kian mendesak juga terjadi pada masyarakat sekitar hutan. Degradasi dan kerusakan hutan terjadi tidak saja karena pembukaan lahan baru, tetapi lebih diakibatkan penjarahan dan perambahan areal hutan. Pengelolaan hutan oleh negara dan swasta (HPH) di Indonesia, berada pada situasi yang sangat memprihatinkan, karena kebablasan dan kesewenangannya memporak porandakan hutan. Hal tersebut terjadi diprediksi sebagai salah satu dampak kekeliruan kebijakan pemerintah dalam mengelola sumberdaya hutan. Kekeliruan tersebut dijadikan dasar legitimasi kekuasaan untuk kepentingan proyek pembangunan, walaupun hilangnya pemenuhan etika sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai resikonya. Dengan metode deskriptif kualitatif, tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan perspektif terjadinya kondisi dilematis antara kebutuhan lahan pertanian, erosi dan pengrusakan hutan dan peminggiran masyarakat sekitar hutan. Program dan upaya penambahan areal tanam pertanian, salah satunya menyebabkan terjadinya ekstensifikasi dan intensifikasi pengelolaan sumberdaya hutan. Terkait hal tersebut, mengindikasikan konteks mewujudkan solusi konflik pemanfaatan hutan yang lestari, berkesinambungan dan berkelanjutan. Pemberdayaan merupakan target yang hendak dicapai, yang dapat terwujud dengan adanya partisipasi dari masyarakat sekitar hutan itu sendiri. Pemaksaan hak penguasaan sumberdaya hutan sebagai dikuasai oleh negara, menjadikan sumberdaya agraria hutan telah terampas dari fungsinya sebagai pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat lokal dan lahan usaha bagi pertanian tradisional. Partisipasi (peran serta) masyarakat sekitar hutan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik dalam program pembangunan, dan merupakan alat/bentuk untuk mencapai pemberdayaan. Dari tulisan ini diharapkan dapat teridentifikasi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik dalam program pembangunan dan pengelolaan sumberdaya hutan. Perlunya mempertahankan dan menjaga kelestarian hutan rakyat yang sudah ada dan memandang hutan rakyat secara holistik agar tujuan program pembangunan lebih dimungkinkan, sehingga dapat dipakai sebagai landasan untuk membangun kembali dunia kehutanan yang telah porak poranda, serta agar tetap memiliki keberlanjutan fungsi dan manfaat selama-lamanya.

Kata kunci: ekstensifikasi, intensifikasi, pengelolaan sumberdaya hutan, kearifan lokal, masyarakat sekitar hutan

ABSTRACT

Increasing population growth in the urgent need of agricultural land also occurs in the community around the forest. Degradation and forest damage that happened of opened new farm land effect and illegal logging, and governmental policy failure effect in forest resource management. With qualitative description method, this paper aim to propose factors determining failure or efficacy of some public policy in many forest resource management and development program. The failure made legitimation power base by for the sake of development project, although the loss of biggest ethics as people prosperity accomplishment risk. Forest domination resource rights enforcing as mastered by state, making agraria forest function have dregs from its as requirement accomplishment local society live effort for traditional agriculture. Forest management by private sector and state (HPH) in Indonesia, at be situation that very concern, because break of the rules destroyed forest. Community forest participate very determine failure or efficacy of public program in development policy, and represent tool to reach enableness. Empowerment represent goals which will be reached, which can be existed with existence participate from community forest. The importance of people forest take care and remain order to own benefit looking into people forest by holistic in order to the development program target more conducive, usable so that as base to rebuild forestry world which have destroyed, and also maintain and and function continueing forever and ever.

Keywords: *intencification, forest resource management, local wisdom, forestry community*

PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan penduduk, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan tentunya berdampak terhadap semakin terbatasnya lahan yang dapat diusahakan. Baik sebagai faktor produksi penghasil bahan pangan, tempat berlangsungnya berbagai kegiatan ekonomi, maupun yang dimanfaatkan sebagai pemukiman. Semakin meningkatnya kebutuhan lahan usahatani sebagai sumber matapencaharian mayoritas masyarakat dan petani di sekitar hutan, juga berdampak meningkatnya nilai ekonominya. Kondisi yang sedemikian rupa tersebut menyebabkan penduduk desa semakin terdesak ke daerah pinggiran di sekitar hutan. Areal hutan dan lahan sekitarnya menjadi komoditi garapan utama bagi mereka.

Tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan perspektif terjadinya dilema antara kebutuhan lahan pertanian, erosi dan pengrusakan hutan dan peminggiran eksistensi komunitas sekitar hutan akibat intensifikasi pengelolaan sumberdaya agraria hutan dalam konteks mewujudkan solusi konflik pemanfaatan hutan yang lestari, berkesinambungan dan berkelanjutan. Terkait dengan penduduk asli di sekitar hutan, tentunya tetap saja mengelola lahan sekitar hutan maupun areal hutan untuk diusahai agar dapat menyediakan bahan-bahan pangan sehari-hari. Sumberdaya lahan yang tinggal sekitar 158,2 juta ha, dimana sekitar 78,7 juta ha di antaranya sesuai untuk usahatani, baik yang berupa dataran yang relatif datar, maupun relatif berbukit.

Berkurangnya luasan hutan dan lahan pertanian ditenggarai karena sudah banyak yang beralih fungsi (menjadi perkebunan maupun pemukiman/vila, dan lain-lain). Berkembang pesatnya pembukaan baru untuk mencukupi kebutuhan petani dan

masyarakat sekitar hutan terhadap lahan pertanian, pada akhirnya menimbulkan berbagai penyimpangan dan problema tersendiri terhadap kelestarian dan keberlanjutan hutan tersebut. Pengelolaan yang arif, bijak dan sesuai dengan kondisi dan tekstur sumberdaya agraria hutan tentu sangat membutuhkan teknologi yang spesifik mengingat peran strategis hutan sebagai sumber serapan air dan udara suatu wilayah.

METODE PENELITIAN

Secara umum penelitian ini mengumpulkan berbagai data dan informasi terkait tujuan penulisan di beberapa lokasi di sekitar hutan di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kalimantan Utara. Data dan informasi yang dikumpulkan di lokasi pengamatan dipilah dan ditabulasi secara sederhana sesuai kriteria yang terkait tujuan penulisan; yang kemudian dengan metode deskriptif kualitatif dikemukakan secara komprehensif. Tulisan dan kajian dari hasil pengamatan lapang diperkaya dengan berbagai hasil analisis data sekunder yang di-review dari berbagai kajian dan tulisan terkait. Review berbagai kajian dan tulisan terkait dilakukan untuk memperluas wawasan penulisan dan juga dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya operasional. Di samping itu juga mengingat luas sebaran dan beragamnya wilayah hutan di kedua provinsi kajian, yang diharapkan tidak mengurangi tujuan penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Marjinalisasi Masyarakat Sekitar Hutan Dampak Paradigma Lama Pengelolaan Hutan

Maraknya pertumbuhan perkebunan di Indonesia mengakibatkan pembukaan hutan besar-besaran dan penebangan pohon-pohon hutan secara luas tanpa memikirkan dampak dan akibatnya. Disisi lain, pengelolaan hutan oleh negara dan swasta (HPH) di Indonesia, berada pada situasi yang sangat memprihatinkan, karena kondisi terjadinya kebablasan dan kesewenangannya telah memporak porandakan hutan dan segala keberadaannya. Pemaksaan hak penguasaan sumberdaya agraria hutan oleh negara, mengindikasikan tersingkirnya fungsi dan peluang pengusahaannya dalam memenuhi kebutuhan lahan sebagai faktor produksi pertanian masyarakat lokal tradisional. Kekeliruan tersebut diprediksi dijadikan juga dasar legitimasi kekuasaan untuk kepentingan proyek pembangunan, walaupun hilangnya pemenuhan etika sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai resikonya. Kesenjangan ini, menurut Dove (1992), menunjukkan kegagalan di pihak para pengambil kebijakan kehutanan (dan merupakan kegagalan program pembangunan kehutanan).

Kekurang pahaman dalam mengartikan pasal 33, ayat (2) UUD 1945 tentang penguasaan dan pemanfaatan sebesar-besarnya oleh negara atas seluruh sumberdaya alam Indonesia merupakan awal kekeliruan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya agraria hutan. Paradigma lama yang bersifat state-based forest management (pengelolaan hutan yang berbasis Negara), berorientasikan produksi dan kekuasaan semata, ternyata sangat memarginalkan

kepentingan masyarakat/komunitas lokal sekitar hutan, dimana mereka berperan sebagai obyek, bukan sebagai pelaku utama (subyek) pembangunan. Kekeliruan tersebut menyebabkan kerusakan hutan yang parah akibat penjarahan dan perambahan.

Timbulnya partisipasi sangat ditentukan oleh manfaat sebagai insentif yang menarik minat petani untuk berperan. Tanpa insentif manfaat tersebut, maka partisipasi akan berubah makna menjadi keterpaksaan dari sukarela (karena lahirnya harapan akan adanya perbaikan kehidupan). Akan tetapi, persepsi dan perilaku aparat pemerintah (pihak birokrat) seringkali tidak sesuai dengan harapan dan dibutuhkan masyarakat petani di sekitar hutan, tentang hutan dan fungsinya. Untuk itu peran keterbukaan (transparansi) sangat dibutuhkan agar mengoptimalkan pemberdayaan antusias masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam suatu program kegiatan pembangunan karena sudah memperoleh pemahaman yang sama atas program tersebut. Pihak pengambil kebijakan di bidang kehutanan mengharapkan adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lahan hutan dan sekitarnya untuk mencapai kelestarian dan fungsinya sebagai lahan pertanian.

Erosi, Gundul, Degradasi Dan Deforestasi Hutan: Aktualisasi Kegagalan Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Pembalakan hutan yang merajalela telah mengakibatkan terjadinya berbagai bencana alam, banjir, erosi, pendangkalan sungai, kekeringan yang parah, anomali iklim dan lonjakan suhu global karena hutan sebagai *buffer* alamiah telah gundul, dan berbagai bencana lainnya. Dominasi dan penetrasi pemerintah terhadap hutan selama ini, dinilai kurang memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan komunitas sekitar hutan, yang secara sistematis akan menyebabkan degradasi dan deforestasi hutan yang parah. Industri HPH yang memperoleh legitimasi dalam kebijakan pemerintah yang berpijak pada pengembangan investasi untuk pembangunan yang besarnya mempengaruhi jumlah sumber energi yang dibutuhkan, sehingga tingginya nilai kontrak mempengaruhi luasnya hutan yang akan digarap.

Degradasi hutan umumnya dipicu tindakan kesewenangan yang hanya memikirkan keuntungan pribadi oleh suatu pihak. Beberapa faktor penyebab kerusakan hutan misalnya: pembukaan hutan untuk perluasan pemukiman yang dilakukan dengan pembabatan pepohonan hutan secara sembarangan dan pembakaran dengan sengaja (*slash and burn agriculture system*), atau kebakaran hutan karena suhu yang terlalu tinggi, serta merajalelanya kuasa dan tindakan industri HPH. Dalam kondisi kian sulitnya mencari sumber lain untuk kehidupan, maka mereka semakin keras memperlakukan pengusaha hutan sekitar lingkungan pemukiman mereka. Justru dengan kondisi tersebut, mereka sering dijadikan kambing hitam pihak terkait untuk menutupi kesewenangan tindakan para pengusaha HPH.

Oknum tersebut diprediksi sebagai promotor yang memprakarsai penduduk agar melakukan penebangan liar dengan iming-iming bayaran (harga) kayu yang tinggi.

Menyikapi hal tersebut, berbagai upaya dilakukan para aktivis LSM dan pemerhati lingkungan untuk menemukan pola pengelolaan sumberdaya agraria hutan, yang bertumpu pada komunitas lokal (Sistem Hutan Kerakyatan/SHK) yang memprakarsai pembentukan KpSHK (Konsorsium pendukung SHK). KpSHK melalui para pendukungnya di berupaya secara proaktif memperjuangkan pengakuan dan legitimasi hukum bagi masyarakat lokal sebagai pemilik sah hak pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan dan untuk memperoleh pengakuan terhadap hak adatnya.

Marjinalisasi Kearifan Lokal Dan Terpinggirnya Masyarakat Sekitar Hutan: Potret Kegagalan Pengelolaan Hutan

Selain itu, perkembangan populasi dan teknologi, kemiskinan dan gaya hidup, pudarnya adat, dan sebagainya juga diprediksi sebagai pemicunya. Masalah pertumbuhan penduduk yang berkembang pesat tentunya berpengaruh pada kegiatan perluasan lahan pertanian dan peternakan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang semakin terbatas dan tinggi nilai ekonomisnya (seperti bahan makanan dan perumahan), dan tingkat kehidupan bersosialisasi itu sendiri. Demi menuju kesejahteraan masyarakat melakukan pengeksploitasian sumber daya alam yang ada (hutan, misalnya), sehingga alam disesuaikan agar mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia (*di-adjustment* tanpa henti). Terjadinya penebangan hutan secara besar-besaran, yang secara sengaja atau kasat mata, sepertinya mengenyampingkan kewajiban untuk melasanakan penanaman kembali (*reboisasi*).

Akankah dicapai keberhasilan atautkah kegagalan sebagai dampak lanjutan suatu kebijakan publik dalam pengelolaan dan program pembangunan sumberdaya lahan hutan. Intensifikasi pengelolaan sumberdaya agraria hutan hendaknya merupakan reaktualisasi wawasan dan wacana *policy maker* untuk menyelenggarakan kebijakan yang berpihak pada sektor pertanian terkait upaya pemenuhan lahan usahatani sumber bahan pangan dan kehidupan komunitas sekitar hutan. Keberpihakan tersebut diharapkan dapat mengatasi konflik pemanfaatan hutan, bukannya meminggirkan kearifan lokal (Elizabeth, 2007a); bahkan mengabaikan keberadaan komunitas sekitar hutan. Kenyataan tersebut juga ditemukan pada komunitas sekitar hutan yang memanfaatkan hutan sebagai sumber pemenuh kebutuhan hidupnya.

Beberapa hal penting terkait hutan rakyat yang harus dipahami, karena dapat menyebabkan kegagalan dalam pengelolaannya, seperti:

1. Kemampuan *kelembagaan* dan institusi lokal;
Dari segi *ekonomi*, terjadi pergeseran seiring beragamanya dinamika kehidupan petani hutan, juga dipengaruhi kondisi geografis, topografis, fungsinya sebagai *paru-paru* dunia, mampu memenuhi prakondisi *sustainable economic development* (pembangunan ekonomi berkelanjutan);
2. Pengelolaan berdasarkan posisi *geografisnya*;
Secara *ekologis*, ekosistem hutan rakyat memiliki *biodiversitas* tinggi dibandingkan kawasan/areal budidaya lain, serta melahirkan sebuah sistem ketahanan pangan

- (*food security*). Dengan demikian, jelas terlihat mata rantai hubungannya dengan fungsi ekonomi (sebagai *Ricardian Rent*) dan semakin hilangnya kaitannya dengan fungsi sosial (sebagai *Sociological Rent*) yang dimiliki tanah (Nasikun, 1995);
3. Dari segi *sosial*, kondisi lingkungan dan tradisi masyarakat yang relatif sangat variatif dibandingkan dengan kawasan rendah (*lowland*) mengakibatkan keputusan sosial petaninya sangat berbeda dengan daerah lain;
 4. Di tengah kekalutan dunia kehutanan Indonesia saat ini, hutan rakyat masih dapat eksis, karena merupakan salah satu *supplier* komoditi utama program penghijauan dan rehabilitasi DAS.

Kegagalan memahami dan mengelola hutan justru meminggirkan kearifan lokal dan mengabaikan keberadaan mereka. Pengelolaan dan penguasaan hutan hanya untuk kepentingan modal dan pertumbuhan ekonomi global, dan bukan untuk kepentingan rakyat setempat. Kelalaian akibat keegoisan pemerintah tersebut mengakibatkan terkikisnya pengetahuan lokal (*local knowledge*) dan kearifan tradisional (Saptana. *et al.* 2004). Di sisi lain, *kegagalan* pengelolaan hutan dengan paradigma *state-based forest management*, tampaknya memenuhi tiga kriteria (Garna, 1999), yaitu: 1) proses pembuatan kebijakan publik yang sepihak; 2) partisipasi masyarakat yang kurang dilibatkan keikutsertaannya; akhirnya 3) menimbulkan konflik kepentingan, yaitu antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah.

Penciptaan Kebijakan Kondusif Terkait Peran Nilai Sosial Ekologi Dan Arousal Agraria Hutan

Mahluk hidup (manusia) agar dapat bertahan hidup, berkembang biak, dan berkelanjutan harus mendukung dan melestarikan lingkungan hidup tersebut. Fakta dan kondisi yang memprihatinkan tersebut membuktikan kebenaran tentang beragamnya bencana alam yang timbul akibat dari penebangan hutan membangkitkan semangat (*arousal*) untuk mencoba memperbaiki alam dan lingkungan hidup (LSM, Lembaga Green Ecology, Pemantau Korupsi Indonesia/ICW, dan sebagainya). *Arousal* tersebut diaktualisasi dengan mendesak pemerintah untuk tetap mengeluarkan undang-undang tentang pemberantasan praktik penebangan kayu secara liar (*illegal logging*), agar memperkuat koordinasi aparat penegak hukum membongkar dan menjerat secara hokum para sindikat mafia kayu dan jaringannya sampai tuntas.

Keseluruhan kondisi tersebut mungkin dilakukan dengan dilatar belakangi *environmental stress* (dimana kedudukan lingkungan sebagai *stressor*) yang terjadi seperti makin rutin dan maraknya bencana alam, kacaunya musim dan iklim, temperatur udara yang tidak stabil, timbul dan meng-epidemi-nya berbagai jenis penyakit dan lain sebagainya, yang dapat dianggap sebagai tanda-tanda (*alarm reaction*) yang dapat men-stress keadaan/kejadian selanjutnya.

Peran manusia di alam ini relatif kecil, dimana terdapat banyaknya perubahan-perubahan ekosistem adalah di luar keterlibatan manusia. Namun karena sikap/nilai antroposentris dan kontempusentris yang melekat dalam diri manusia sejak lahir, bisa

menjadi sumber masalah. Nilai antroposentris adalah nilai dimana manusia menganggap dirinya sebagai makhluk yang paling sempurna, yang selalu menginginkan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Nilai kontemporer, dimana manusia yang lebih mementingkan keadaan masa kini saja (kontemporer) dibanding masa depan.

Partisipatif Mendukung Pemberdayaan, Keberadaan Dan Kearifan Lokal Masyarakat Sekitar Hutan

Pemberdayaan pada dasarnya merupakan upaya menumbuhkan partisipasi berbagai pihak terkait, terutama pihak yang hendak diberdayakan, yang memungkinkan suatu potensi dapat berkembang dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*arousal*) akan potensi yang dimiliki (Elizabeth, 2007). Kondisi ini dapat berlangsung dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: 1) partisipatif; 2) transparansi; 3) akuntabilitas.

Faktor pendukung pemberdayaan petani sekitar hutan meliputi: 1) kekuatan solidaritas petani sebagai konsekuensi lahir dan terbentuk dari masyarakat di sekitar hutan tersebut; 2) struktur dan aturan main merupakan produk konstruksi petani itu sendiri sehingga ditaati, dihargai, dan dijunjung tinggi oleh semua anggota masyarakat petani maupun komunitasnya; 3) bersifat informal dengan struktur sederhana dan arah yang adil dan bukan persaingan; 4) persepsi yang baik dari petani maupun buruh tani terhadap kedudukan dan peran usahatani; 5) partisipasi para petani yang tinggi; dan 6) memiliki kemampuan beradaptasi terhadap: agro-ekosistem setempat, mekanisme pembangunan yang diterapkan, maupun dinamikanya dalam mensiasati kemungkinan eksploitasi oleh petani lapisan atas.

Pemberdayaan petani sekitar hutan merupakan proses yang menghasilkan keberdayaan mereka. Keberdayaan bukan hanya memperoleh manfaat sebesar-besarnya, namun juga *keberdayaan* dalam memegang amanat dan tanggungjawab menjaga dan mengembangkan fungsi lahan sekitar hutan yang berkelanjutan (Elizabeth. 2008). Tujuannya sebagai sumberdaya lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kehidupan komunitas sekitar hutan. Bila sumber penghidupan dan ekonomi secara subsisten telah tercukupi, diharapkan mereka tidak terintimidasi dan tergoda iming-iming ekonomi dari pembalakan hutan, karena pada prinsipnya mereka sangat menghargai dan menghormati hutan turun temurun. Beberapa *kriteria pembangunan* yang dapat menggerakkan *partisipasi* masyarakat adalah: 1) peran masyarakat; 2) transparansi atau keterbukaan; 3) pemahaman ; dan 4) manfaat sebagai insentif.

Untuk tumbuh-kembangnya kehutanan dan merealisasikan pemenuhan lahan pertanian masyarakat sekitar hutan, dalam pelaksanaannya dibutuhkan dukungan kebijakan yang kondusif dan meminimumkan hal-hal yang bersifat *distortif*, yang

mampu mengkomodasikan berbagai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Penciptaan kebijakan kondusif meliputi:

1. Perbaikan sistem dan mekanisme pemasaran khususnya peningkatan harga jual di tingkat petani;
2. Perubahan persepsi sosial terhadap nilai kerja pertanian agar tidak lagi sebagai alternatif terakhir karena kurang terhormat dan tidak mampu mengangakat status kehidupan masyarakat;
3. Selektifitas adopsi paket teknologi agar tidak memudarkan peran petani dan menghilangkan pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*).

Partisipasi (peran serta) masyarakat sangat menentukan *keberhasilan* atau *kegagalan* suatu kebijakan publik dalam program pembangunan (UU No. 41/1999, tentang Kehutanan, yaitu: pada pasal (2): Penyelenggaraan Kehutanan berazaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan; pada pasal (3), huruf (d): Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan: meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan kebersamaan sosial ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal.

Partisipasi dapat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi mencerminkan upaya mewujudkan kemandirian yang transparan dan akuntabel antara komponen pemerintah, masyarakat, dan swasta, yang dilandasi aturan kebijakan untuk berpartisipasi sesuai proporsi dan kompetensi yang dimiliki secara terukur dan berkelanjutan. Partisipatif dimaksudkan agar dapat menjembatani antara aspirasi dan kebutuhan masyarakat petani di sekitar hutan, sebagai pelaku utama/subyek pembangunan. Partisipasi bisa tumbuh membutuhkan:

1. *Tranparansi/keterbukaan*, dengan mengingat bahwa keterbukaan dapat menimbulkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan;
2. *Pemahaman* yang sama atas program pembangunan, yang dapat menimbulkan antusiasisme masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan;
3. *Manfaat* atau *insentif* yang akan mereka peroleh, akan menimbulkan partisipasinya terhadap program pembangunan tersebut.

Selain itu, makna partisipatif juga diharapkan dapat menggugah kesadaran publik bahwa terjadinya keberhasilan maupun kegagalan proses pembangunan pertanian dan kehutanan di sekitar hutan bukan tanggung jawab pemerintah semata, melainkan sangat bergantung pada keberhasilan keterlibatan masyarakat petani sekitar hutan dalam penyelenggaraan pembangunan tersebut, dari awal hingga akhir, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kebijakan Kondusif Penunjang Pemberdayaan Petani Dan Komunitas Sekitar Hutan Penciptaan Keberhasilan Pengelolaan Agraria Hutan Dan Sekitarnya

Perlunya upaya memperkuat potensi atau daya yang dimiliki dengan membuka atau menciptakan aksesibilitas terhadap berbagai peluang yang menjadikannya semakin berdaya (Elizabeth, 2005). Hal tersebut ditempuh dengan melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas (*good governance*) dalam konsolidasi dan koordinasi di antara mereka, serta pemahaman mendalam terhadap aspek dan kriteria pembangunan kehutanan masyarakat (Tabel 1).

Tabel 1. Aspek dan Kriteria sebagai Prasyarat Pembangunan Kehutanan Masyarakat di Indonesia

ASPEK	KRITERIA SEBAGAI PRASYARAT
Subtansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. mampu mengakomodasikan semaksimal mungkin berbagai aspirasi yang tumbuh dari bawah. 2. memperjelas status pelaku dan objek lain yang diatur, hubungan antar pelaku dan hubungan pelaku dengan sumberdaya hutan atau objek lainnya yang diatur. 3. dapat memberikan bentuk-bentuk insentif ekonomi, sehingga tercipta self interest, untuk berlangsungnya suatu proses pembelajaran, terutama dalam peningkatan, kapasitas, kapabilitas dan adaptability. 4. mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan unsur-unsur ketidak pastian. 5. tidak diskriminatif. 6. tidak multi-interpretatif. 7. tidak mengandung unsur single perception yang sempit.
Proses	1. menggunakan pendekatan bottom-up process.
Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 2. memperhatikan perbedaan dan keragaman kondisi lapangan yang ada. 3. menerapkan asas demokrasi. 4. menerapkan asas transparansi dan partisipatif.

Sumber: Suhardjito, D. 2000

Meski demikian, keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari berbagai dampak yang mengakibatkan terjadinya erosi, tanah longsor dan bencana alam lainnya. Namun hal ini lebih diakibatkan *human error*, dimana beberapa pihak mengenyampingkan bahkan mengabaikan berbagai ketentuan dan persyaratan yang sangat *causal*, penting dan *crusial* dalam strategi pengelolaan agraria hutan dan sekitarnya. Bukti nyata keberhasilan pengelolaan agraria hutan dan sekitarnya yang adaptif dan inovatif sebagai lahan pertanian diantaranya adalah *succes story* dari daerah pertanian di puncak Dieng, di Malang, puncak Bogor (Jawa), Berastagi (Medan, Su-Mut), KASS dan Kawasan Agropolitan di Kerinci dan Curup, Bengkulu (Sumatera), Malino, Sinjai, Luwu, dan Tomohon (Sulawesi), Bedugul (Bali) dan berbagai wilayah hutan dan pegunungan lainnya di Indonesia. Dalam hal ini wilayah tersebut umumnya berhasil diusahakan sebagai areal pertanaman berbagai komoditas hortikultura karena sesuai dengan kondisi iklim, ekosistem dan topografi lahan, dimana wilayah sekitar areal pertanian tersebut masih lestari sebagai hutan.

Dalam penciptaan kebijakan kondusif yang menunjang pemberdayaan petani dan komunitas sekitar hutan terkait dengan sumber pendapatan (Elizabeth. 2008a), diperlukan beberapa upaya konkrit seperti;

1. Melibatkan kembali peran tokoh informal dalam kegiatan penggalangan sosial ekonomi SDM petani;
2. Melibatkan tokoh agama dalam membangun etos kerja dan strategi hidup produktif dan hemat;
3. Pemberian pelatihan/peningkatan kemampuan SDM petani agar mengarah pada unit ekonomi produktif;
4. Melakukan pengkaderan generasi muda pertanian di perdesaan. Secara evolutif, pengeluaran rumahtangga petani diefisienkan dan diarahkan ke aktivitas yang hemat waktu dan biaya. Sifat kedinamisan pemberdayaan sebagai faktor utama penyesuaian langkah keseimbangan pada segala perubahan yang terjadi.

Pemahaman tersebut juga disertai penerapan peraturan (perundang-undangan) sebagai alat ancaman hukuman yang serius dan bukan hanya sebagai gertakan semata, dan yang paling penting adalah menjaga ke-konsisten-an pelaksanaan peraturan tersebut. Proses penyusunannya harus transparan dan partisipatif dengan berjalannya asas demokrasi serta melalui mekanisme yang *bottom-up* (dimulai dari bawah). Pembahasan dan deskripsi tersebut hendaknya menjadi latar belakang para *policy maker* dalam menyusun dan membuat serta pengambil suatu kebijakan pemerintah dengan selalu mengantisipasi dampak yang bisa saja timbul di kemudian hari. Penyempurnaan *cara* atau *pola pikir* bukan untuk tujuan segolongan/sepihak belaka, melainkan untuk tujuan kebersamaan/semua golongan dan bisa terjaga kelestarian lingkungan keberadaannya.

Dengan bentuk kebijakan kondusif tersebut, diharapkan dapat mengidentifikasi pihak-pihak pelaku yang terlibat, hubungan antar pelaku, hubungan antar pelaku dengan kondisi sumberdaya hutan, serta perilaku sebagai perwujudan terjadinya proses belajar, sehingga kapabilitas dan adaptabilitas semua pelaku secara bertahap dapat ditingkatkan. Target pemberantasan penjarahan hutan bisa lebih maksimal hasilnya bila terjadi *interaksi positif* untuk *meningkatkan kohesitas* hubungan dan tanggungjawab kerja antar instansi yang berwenang dan terkait.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

1. Deforestasi dan degradasi hutan umumnya dipicu oleh tindakan egoistis dan kesewenangan suatu pihak yang hanya memikirkan keuntungan pribadi dan sesaat.
2. Perlu penerapan peraturan (perundang-undangan) sebagai alat ancaman hukuman yang serius dan konsisten bukan hanya sebagai gertakan semata. Proses penyusunannya harus transparan dan partisipatif dengan berjalannya asas demokrasi serta melalui mekanisme yang *bottom-up*.

3. Perlu memandang hutan rakyat secara holistik dan mempertimbangkan pengetahuan dan kearifan lokal, serta merestrukturisasi paradigma *state-based forest management* dengan paradigma *community-based forest management*, untuk mencapai pembangunan pertanian sekitar hutan yang berkualitas dan tetap memiliki keberlanjutan fungsi hutan serta manfaat selama-lamanya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
4. Partisipasi masyarakat sekitar hutan turut menentukan berhasil tidaknya program pembangunan pertanian sekitar hutan, dan merupakan alat mencapai pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan target yang dapat terwujud dengan partisipasi masyarakat sekitar hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dove, M. R. 1988. *Sistem Perladangan di Indonesia*. Studi Kasus dari Kalimantan. UGM. Press. Yogyakarta.
- Elizabeth, R. 2005. *Potret Dialektika Persoalan Tenurial Kekayaan Agraria Hutan di Indonesia*. Kumpulan Tulisan Program SPD 2004. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Elizabeth, R. 2007. *Fenomena Sosiologis Metamorphosis Petani: Ke Arah Keberpihakan Masyarakat Petani Di Pedesaan Yang Terpinggirkan Terkait Konsep Ekonomi Kerakyatan*. Forum Agro Ekonomi (FAE) Vol. 26. Juli 2007. PSE-KP. Bogor. Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Elizabeth, R. 2007a. *Reorientasi dan Peran Kearifan Lokal Dalam Akselerasi Inovasi Sistem Integrasi Tanaman Ternak mendukung Ketahanan Pangan di Pedesaan*. Keamanan Produk Pangan Hewani di Indonesia. Prosiding Nasional Hari Pangan Sedunia XXVII Dukungan Teknologi untuk Meningkatkan Produk Pangan Hewani dalam Rangka Pemenuhan Gizi Masyarakat. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian, Bogor, 21 Nopember 2007, hal. 139-153.
- Elizabeth, R. 2008. *Diagnosa Kemarjinalan Kelembagaan Lokal untuk Menunjang Perekonomian Rakyat di Pedesaan*. Jurnal SOCA. Vol. 8. No. 2. Juli 2008. hal. 58-64. Jur. Sosial Ekonomi Pertanian. Universitas Udayana. Bali.
-
- Elizabeth, R. 2008a. *Penguatan dan Pemberdayaan Peran Pembangunan Perekonomian, Sistem Pasar dan Kelembagaan: Dilema Dilema Kemiskinan dan Kelaparan di Pedesaan*. Prosiding Seminar Nasional: "Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi Mendukung Ketahanan Pangan di Wilayah Kepulauan." BPTP Maluku Ambon, 29-30 Oktober 2007. BPTP Maluku Ambon. Balitbang. Departemen Pertanian. 2008.
- Garna, J. K. 1999. *Teori Sosial dan Pembangunan Indonesia*. Primaco Akademi. Bandung.

Saptana, R. Elizabeth. 2004. *Transformasi Kelembagaan Guna Memperkuat Ekonomi Rakyat di Pedesaan*. Journal on Socio-Economics of Agricultural and Agribusiness. (Jurnal SOCA). Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Universitas Udayana. Bali.

Suhardjito. D. 2000. *Kehutanan Masyarakat, Beragam Pola Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan*. IPB. Bogor

=====